

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang diantaranya harus mempertimbangkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 5);

10. Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan pengaturan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) IKU Tahun 2024-2026 terdiri atas:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan indikator kinerja individu;
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- e. pengukuran kinerja;
- f. penyusunan laporan kinerja;
- g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 7 Seri E); dan

b. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 Penetapan Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 Penetapan Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Agustus 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]$ Dimana : X(1) = Indeks Harapan Hidup X(2) = Indeks Pendidikan X(3) = Indeks Standar hidup layak		Badan Pusat Statistik
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT: Tingkat pengangguran terbuka (%) PP: Jumlah pengangguran (orang) PAK: Jumlah angkatan kerja (orang)		Badan Pusat Statistik
Meningkatnya Masyarakat Terdidik dan Berkarakter	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Pusat Statistik

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (LamaSekolahPendudukke - i)$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P₁₅₊ = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas 2. Lama sekolah penduduk ke-i: <ul style="list-style-type: none"> > Tidak pernah sekolah = 0 > Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 > Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 > Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir > Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 3. Tahun konversi ijazah <ul style="list-style-type: none"> > Tidak punya ijazah = 0 > SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun > D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun > S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun 		
	Harapan Lama Sekolah	<p>Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan :</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Pusat Statistik

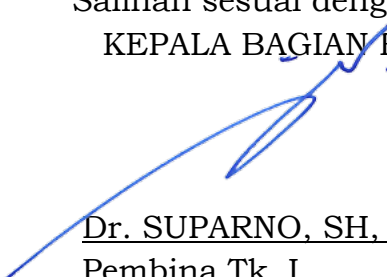
KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (a, a+1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren		
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok individu di suatu wilayah	Dinas Kesehatan	Badan Pusat Statistik
Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali seratus persen	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Pusat Statistik
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB(n) - PDRB(n-1)}{PDRB(n-1)} \times 100\%$ $PDRB(n)$ = nilai PDRB tahun n $PDRB(n-1)$ = nilai PDRB tahun $n-1$		Badan Pusat Statistik
	Pendapatan per kapita (ribu Rp)	$\frac{PDRB}{Jumlah\ Penduduk}$		Badan Pusat Statistik
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	$\frac{PDRB\ Ekraf(n) - PDRB\ Ekraf(n-1)}{PDRB\ Ekraf(n-1)} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
Meningkatnya Potensi Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota Secara Terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	Hasil rata-rata indikator pembentuknya, yaitu: ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan, dan kontribusi terhadap perekonomian	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	Dinas Lingkungan Hidup	
Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berasaskan Keberagaman	Angka Kemiskinan	<p>Persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p>		Badan Pusat Statistik
	Gini Rasio	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>Dimana : P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p>		Badan Pusat Statistik

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		Q _i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i		
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial dan Daya Beli Masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Dinas Sosial, P3AP2KB	
	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$ <i>P_{ij}</i> = harga komoditas i dikota j <i>P_{ik}</i> = harga komoditas i di Jakarta Selatan <i>m</i> = jumlah komoditas	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Badan Pusat Statistik
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	<i>Nilai rata – rata terbagi unsur total nilai persepsi per item</i> $= \frac{\text{Total nilai persepsi per item}}{\text{Total item yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Indikator penyusun IPMas: Indeks Gotong Royong, Indeks Toleransi dan Indeks Rasa Aman.	Kecamatan	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG = IPM perempuan/IPM laki-laki	Dinas Sosial, P3AP2KB	Badan Pusat Statistik
Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda yang Ditegakkan	Jumlah Perda yang mengandung sanksi yang ditegakkan dibagi dengan jumlah Perda yang mengandung sanksi dikali seratus persen	Satpol PP	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian PANRB	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
				dan Reformasi Birokrasi
	Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BKAD	BPK RI
	Maturitas SPIP	Hasil evaluasi SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektorat Daerah	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	a. aspek perencanaan kebutuhan; b. aspek Pengadaan; c. aspek Pengembangan Karir; d. aspek Promosi dan Mutasi; e. aspek Manajemen Kinerja; f. aspek Penggajian; g. aspek Perlindungan dan Pelayanan; dan h. aspek Sistem Informasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Komisi Aparatur Sipil Negara
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Laporan Hasil Evaluasi Kematangan SPBE oleh Kementerian PANRB	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Institusionalisasi Pendidikan Karakter yang Berkeadilan dan Berbudaya	Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (a, a+1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Pusat Statistik
	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Pusat Statistik

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		<p>semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (LamaSekolahPendudukke - i)$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P₁₅₊ = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas 2. Lama sekolah penduduk ke-i: <ul style="list-style-type: none"> > Tidak pernah sekolah = 0 > Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 > Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir +1 > Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir > Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 3. Tahun konversi ijazah <ul style="list-style-type: none"> > Tidak punya ijazah = 0 > SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun 		

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		> D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun > S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun		
Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan dalam Mendukung Pendidikan yang Berkarakter dan Berbudaya	Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%)		Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; dan Bidang Ketenagaan	
	Persentase anak kelas 1 SD/MI yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini	$Aks = N_p / N \times 100\%$	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Pelestarian Kebudayaan	Jumlah Data Kebudayaan yang aktif di Kota Malang dibagi Jumlah Seluruh Data Kebudayaan di Kota Malang dikalikan 100%	Bidang Kebudayaan	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

2. DINAS KESEHATAN

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok individu di suatu wilayah	Dinas Kesehatan	Badan Pusat Statistik
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Persentase RS, Puskesmas, Labkesda yang terakreditasi	Jumlah RS, Puskesmas, Labkesda yang terakreditasi dibagi jumlah RS, Puskesmas, Labkesda dikali seratus persen	Bidang Sumber Daya Manusia, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Laporan Tahunan RS; SIRS <i>Online</i> (RS <i>Online</i>); Laporan Validasi Data Puskesmas Kota Malang;

			Bidang Pelayanan Kesehatan	Laporan Tahunan UPT Labkesda
	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah keluarga dengan IKS di atas 0,8 dibagi jumlah seluruh keluarga	Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kementerian Kesehatan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

3. DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\sum_i \frac{UPLM}{AM} \cdot 100$ <p>UPLM 1 : Rapat ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk UPLM 2 : Persentase kemanfaatan perpustakaan dan masyarakat UPLM 3 : Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk UPLM 4 : Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional perpustakaan UPLM 5 : Jumlah pemasyarakatan gemar membaca</p>	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	Nilai dari Kajian IPLM dan TGM

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		UPLM 6 : Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 : Anggota perpustakaan AM : Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan		
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	$TGM = (0,3FM + 0,3DM + 0,3JB) + (0,05FAI + 0,05DAI)$ FM : Frekuensi Membaca DM : Durasi Membaca JB : Jumlah Bacaan FAI : Frekuensi Akses Internet DAI : Durasi Akses Internet	Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan; Bidang Preservasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	
	Tingkat Kepuasan Pemustaka	Nilai SKM	Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Preservasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Nilai Hasil SKM
Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang Komprehensif dan Terpadu	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	$T = (a + i + s + j) / 4$ a : Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i : Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s : Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j : Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Bidang Pengelolaan Arsip	Arsip aktif, inaktif, statis dari (Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah), daftar arsip usul musnah dari (BKPSDM)

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pengolahan, Perlindungan dan Pelestarian serta Akses Arsip	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai dari ANRI	Bidang Pengelolaan Arsip	Nilai dari hasil pengawasan kearsipan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

4. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Wirausahawan yang Berdaya Saing	Nilai Ekspor Non Migas	Sisa dari total produksi nasional setelah dikurangi total kebutuhan konsumsi masyarakat, total kebutuhan untuk keperluan investasi masyarakat, dan total kebutuhan untuk keperluan pemerintah $X=Y-(C+i+G)$	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$ <p>P_{ij} = harga komoditas <i>i</i> dikota <i>j</i> P_{ik} = harga komoditas <i>i</i> di Jakarta Selatan m = jumlah komoditas</p>		
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Sehat yang Modern	Jumlah koperasi Sehat dan cukup sehat dibagi jumlah seluruh koperasi yang melaksanakan RAT x 100 %	Bidang Koperasi	Data koperasi (<i>Online Data Sistem Kemenkop RI</i>)
	Nilai Tambah Volume Penjualan Usaha Mikro	Jumlah Omset usaha mikro binaan Tanun N dikurangi Jumlah Omset penjualan usaha mikro binaan	Bidang Usaha Mikro	Data Usaha Mikro binaan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		tahun N-1 dibagi Jumlah Omset Penjualan usaha mikro binaan tahun (N-1) dikali 100%		
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Wirausaha Industri Kecil yang Tumbuh (kumulatif)	Laju pertumbuhan industri tahun berjalan	Bidang Industri	Data Pertumbuhan Industri
Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat dan Pasar Produk Dalam Negeri	Persentase Pasar Rakyat yang Bersertifikat dan Berstandar Nasional	Jumlah pasar yang sudah bersertifikat SNI dibagi jumlah total pasar rakyat di Kota Malang	Bidang Perdagangan	Data Pasar ber SNI
	Persentase produk dalam negeri yang dipasarkan	Verifikasi lapangan (Petugas mendatangi sampel gerai yang sudah ditentukan)		Data Penjualan Produk dalam negeri di pasar rakyat dan ritel Modern
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	Simpang standar dibagi harga rata-rata dikali 100%		Data 9 Komoditi bahan pokok di 26 pasar rakyat
	Indeks keberdayaan konsumen	Survei tatap muka secara langsung kepada konsumen terkait perilaku konsumen pada saat melakukan interaksi dengan pasar yakni saat pra pembelian, saat pembelian dan pasca pembelian, meliputi dimensi pencarian informasi pengetahuan tentang undang-undang dan Lembaga Perlindungan Konsumen, pemilihan barang dan jasa, perilaku pembelian, kecenderungan untuk bicara dan perilaku <i>complain</i> (keluhan).		Pengumpulan data primer responden dilakukan oleh Lembaga Penelitian yang ditunjuk
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

5. DINAS SOSIAL, PERMBERDAYAAN PERPEMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Dinas Sosial, P3AP2KB	
Meningkatnya Aksesibilitas Perlindungan Sosial, Pelayanan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Kerentanan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Akses Perlindungan Sosial, Pelayanan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Kerentanan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan akses perlindungan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, kerentanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial dibagi PPKS dikali 100%	Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Dayasos	
Meningkatnya Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Ratio KDRT	Jumlah KDRT dibagi Jumlah Kepala Keluarga x 1000	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Data Laporan KDRT
Terwujudnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG = IPM perempuan/IPM laki- laki	Dinas Sosial, P3AP2KB	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks keterwakilan perempuan di parlemen ditambah indeks pengambilan keputusan ditambah indeks pendapatan perkapita perempuan dibagi 3	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Data Hasil Pemilu
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	$P_t = P_o + (B - D) + (M_i - M_o)$ Keterangan <i>P_t</i> = Jumlah penduduk pada tahun ke <i>t</i> <i>P_o</i> = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) <i>B</i> (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 – <i>t</i>		

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 – t M_o = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 – t M_i = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 – t		
Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	Jumlah Penduduk tahun berkenaan dikurangi tahun n-1 dibagi jumlah penduduk tahun berkenaan dikalikan 100	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Kependudukan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

6. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	\sum index ketahanan pangan kota x nilai standarisasi masing masing indikator pada kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Badan Pangan Nasional
Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Neraca Bahan Makanan
	PDRB Sektor Pertanian	Jumlah produksi sektor pertanian (tahun n) dikurangi jumlah produksi sektor pertanian (tahun n-1) dibagi jumlah produksi sektor pertanian (tahun n-1) dikali seratus persen	Bidang Pertanian; Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Bidang Perikanan	Badan Pusat Statistik
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

7. DINAS PERHUBUNGAN

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kuantitas, Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	IKLI Perhubungan	Nilai IKLI	Dinas Perhubungan	Hasil Survey
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase Pelayanan Angkutan Jalan	Jaringan jalan yang terlayani angkutan umum dibandingkan dengan total jaringan jalan	Bidang Angkutan	Data angkutan jalan
	Angka Kemacetan	V/C Ratio Keterangan: V= Volume Kendaraan C= Kapasitas jalan	Bidang Lalulintas	Data titik kemacetan
Meningkatnya Kontribusi Parkir terhadap Retribusi Daerah	Persentase Retribusi Parkir terhadap Hasil Retribusi Daerah	Jumlah retribusi parkir tahun n dikurangi jumlah retribusi parkir tahun n-1 dibagi jumlah retribusi parkir tahun n-1 x 100%	Bidang Pengelolaan Perparkiran	Data Realisasi PAD
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

8. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Kematangan SPBE	Nilai Indeks Kematangan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penilaian KemenpanRB
	Indeks Tata Kelola SPBE	Nilai Indeks Tata Kelola SPBE	Bidang Aplikasi Informatika	Penilaian KemenpanRB/Penilaian Mandiri

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Kebijakan SPBE	Nilai Indeks Kebijakan SPBE (sumber Permenpan Nomor 59 Tahun 2020)	Bidang Aplikasi Informatika	Penilaian KemenpanRB/Penilaian Mandiri
	Indeks Layanan SPBE	Nilai Indeks Layanan SPBE	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Penilaian KemenpanRB/Penilaian Mandiri
	Indeks Manajemen SPBE	Nilai Indikator dihitung berdasarkan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot (1,5)	Bidang Statistik dan Persandian	Penilaian KemenpanRB/Penilaian Mandiri
		Nilai indikator dihitung berdasarkan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator (1,5)		
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan publik dan prioritas	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Survei	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

9. DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja dibagi jumlah tenaga kerja dikali seratus persen	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal	BPS

			dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja	Jumlah penduduk yang bekerja dibagi Jumlah angkatan kerja dikali 100%		BPS
Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial yang Kondusif	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terfasilitasi dan terselesaikan	Jumlah kasus yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang masuk dikali 100%		Data Bidang Naker
Meningkatnya Daya Saing Penanaman Modal	Nilai Investasi Daerah	Nilai investasi tahun n dikurangi nilai investasi tahun (n-1) dibagi nilai investasi tahun (n-1) dikali 100%	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Bidang Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	Data dan Sistem Informasi
Meningkatnya Daya Saing Penanaman Modal	Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi tahun n		NSWI-BKPM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai SKM		Hasil Survei
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada Aspek Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Nilai Indeks SPBE		Hasil Evaluasi SPBE Kemenpan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Predikat WBK/WBBM	Penetapan WBK/WBBM	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penetapan Kemenpan RB

Menguatnya Tata Kelola Kependudukan	Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik ditambah yang memiliki KIA dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Database Kependudukan
	Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan dibagi jumlah dokumen administrasi kependudukan dikali 100%	Bidang Pendaftaran Penduduk & Bidang Pencatatan Sipil	Database Kependudukan
Meningkatnya Sistem Layanan Publik yang Cepat, Mudah dan Terintegrasi	Persentase Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan Administrasi Kependudukan untuk Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan kerja sama dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali 100 %	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Database Kependudukan
	Persentase Instansi dan Lembaga yang telah melakukan perjanjian kerja sama tentang pelayanan Adminduk	Jumlah Instansi dan Lembaga yang melakukan Perjanjian Kerja Sama dibagi Jumlah Instansi dan Lembaga yang ada di sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dikali 100%	Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK)	Database Kependudukan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

11. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISITA

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Laporan hasil pengukuran

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan Kepemudaan yang Produktif dan Inovatif	Persentase Pemuda Berwirausaha	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kepeloporan dibagi jumlah pemuda Kota Malang dikali 100%	Bidang Kepemudaan	Laporan pelaksanaan kegiatan
Meningkatnya Budaya Olahraga dan Prestasi Olahraga	Tingkat Partisipasi Berolahraga Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti olahraga massal dibagi jumlah penduduk Kota Malang usia 10 tahun ke atas dikali 100%	Bidang Keolahragaan	Laporan pelaksanaan kegiatan
	Peringkat Kota Malang pada <i>event</i> PORSD	Peringkat Kota Malang pada <i>event</i> PORSD	Bidang Keolahragaan	Laporan pelaksanaan kegiatan
	Peringkat Kota Malang pada <i>event</i> POPDA	Peringkat Kota Malang pada <i>event</i> POPDA	Bidang Keolahragaan	Laporan pelaksanaan kegiatan
	Peringkat Kota Malang pada <i>event</i> PORPROV	Peringkat Kota Malang pada <i>event</i> PORPROV	Bidang Keolahragaan	Laporan pelaksanaan kegiatan
Terwujudnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	$\frac{PEkraf (n) - PEkraf (n - 1) \times 100\%}{PEkraf (n - 1)}$	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Laporan hasil pengukuran
	PDRB Sektor Pariwisata	PDRB Sektor Pariwisata (akomodasi/hotel dan makanan minuman/resto/rumah makan) dibagi PDRB Kota Malang dikali 100%	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	BPS
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi <i>start-up</i> Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n dikurangi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 dibagi jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 dikali 100%	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan pendataan pelaku ekonomi kreatif

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata di Kota Malang tahun ke n	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Laporan pendataan dari pokdarwis dan hasil survei
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Kemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	Hasil Uji Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ik})^2}{2}}$ <p>Dimana</p> <p>L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)</p> <p>C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)</p> <p>IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)</p> <p>IP_j : $(C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j}, \dots)$</p> <p>$(C_i/L_{ij})_{Maksimum}$: Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}</p> <p>$(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}$: nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}</p>		Hasil Uji Pemantauan Kualitas Air
	Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$		Hasil Uji Pemantauan Kualitas Udara

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kota Malang	Indeks Kualitas Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana, IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan</p>		Hasil Analisi dan Perhitungan IKTL
	Persentase Pengelolaan Sampah	<p><i>Persentase Penanganan Sampah ditambah Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai komulatif)</i></p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Persentase Pengurangan Sampah = Jumlah sampah yang berkurang oleh masyarakat dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100 %</i> <i>Persentase Penanganan Sampah = Jumlah Sampah yang ditangani oleh Pemerintah Kota/DLH</i> 	Bidang Persampahan dan Limbah B3; UPT Pengelolaan Sampah	Data Sampah yang masuk ke TPA dan Sampah yang diolah ke PKD dan TPS
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

13. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Kota yang Inklusi secara Terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai Survei IKLI tingkat Kota Malang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan	Laporan Hasil Survei IKLI Tingkat Kota Malang

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
			dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Kota	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Nilai Survei IKLI Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Bidang Bina Marga; Bidang Cipta Karya; Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Survei
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKLI PU-PKP)	Nilai Survei IKLI Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman pada 8 variabel infratraktur (jalan, jembatan, drainase, irigasi, air minum, sanitasi, perumahan, dan permukiman) terhadap 4 instrumen pengukuran (ketersediaan sarana, kualitas fisik sarana, kesesuaian penyediaan sarana antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, dan efektifitas pemanfaatan sarana).	Sekretariat; Bidang Cipta Karya; Bidang Bina Marga; Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Hasil Survei IKLI PU-PKPs
	Rasio luas genangan	Luas genangan lebih dari 20 cm selama 1 jam dibagi luas genangan di Kota Malang	Bidang Bina Marga	Laporan Hasil Survei dan Digitasi Penanganan Genangan
	Persentase Area Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh dibagi luas Kota Malang dikali seratus persen	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Data Rekapitulasi Penanganan Kawasan Kumuh

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan dan Penataan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Ketaatan Tata Ruang	Jumlah luas lahan yang sudah memiliki keterangan rencana kota dibagi luas Kota Malang dikali seratus persen	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Data KRK
Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan dan Penataan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Ketataan Tata Ruang	Jumlah luas lahan yang dinilai ketaatan pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang dibagi luas wilayah Kota Malang dikali seratus persen	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Laporan Hasil Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

14. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kondusivitas Lingkungan Sosial	Indeks Kota Toleran	Jumlah kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial yang terselesaikan dibagi kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial dikali seratus persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial
Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa	Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa	Jumlah kejadian yang terselesaikan dibagi seluruh kejadian dikali seratus persen	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; Bidang Kewaspadaan Nasional	Data kejadian gangguan disintegrasi yang terjadi di Kota Malang dalam satu tahun Data kejadian gangguan disintegrasi yang terselesaikan

Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Peran Serta Ormas dalam Pembangunan	Jumlah Ormas yang terdaftar dan berperan aktif dalam pembangunan dibagi jumlah Ormas terdata dikali seratus persen	Bidang Politik Dalam Negeri	Data Ormas yang terdaftar dan berperan aktif dalam pembangunan Data Ormas yang terdata
	Persentase Penduduk yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dikali seratus persen	Bidang Politik Dalam Negeri	Data Pemilih dalam Pilpres dan Pileg 2024 Data Daftar Pemilih tetap (DPT) Kota Malang tahun 2024
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

15. BADAN PENDAPATAN DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Potensi Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Realisasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Data Realisasi PAD
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100 %	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD; Bidang Pajak Daerah; Bidang Pengendalian Pajak Daerah	Data Realisasi PAD
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

16. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Nilai evaluasi SAKIP komponen Perencanaan pada SAKIP Kota Malang yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan Hasil Evaluasi SAKIP Kota Malang oleh Kemenpan-RB
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	(Persentase capaian aspek 1 x 20) + (Persentase capaian aspek 2 x 45) + (Persentase capaian aspek 3 x 35) dibagi 3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kertas Kerja Evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja Bappeda
	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah	Jumlah Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Hasil kelitbangan dalam renja perangkat daerah dikali 100%.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Daerah	Jumlah capaian kinerja daerah dibagi jumlah kinerja daerah dikali 100%	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi untuk Dijadikan Kebijakan Selaras dengan Prioritas Pembangunan	Persentase Inovasi yang Memiliki Nilai Tambah	(Persentase capaian aspek 1 x 40) + (Persentase capaian aspek 2 x 60) + dibagi 2	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Bappeda
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

17. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien	Opini BPK	Hasil Opini BPK	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah kota malang	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan; Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap PAD	Nilai kontribusi pemanfaatan barang milik daerah dibagi nilai PAD dikali seratur persen	Bidang Pemanfaatan Aset Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

18. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Komisi Aparatur Sipil Negara
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang BerAKHLAK	Indeks Profesionalitas ASN	$IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ Keterangan: IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Negara

		IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin		
	Persentase ASN yang Ditempatkan Sesuai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi dibagi Jumlah ASN Pemkot dikali 100%	Bidang Mutasi; Bidang Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Data Kepegawaian
	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital	Jumlah layanan manajemen ASN yang berbasis digital dibagi jumlah pelayanan kepegawaian dikali 100%	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Data Kepegawaian
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

19. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	<i>Disaster Resilience Scorecard</i> /- Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai sepuluh faktor esensial pembentuk ketangguhan kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Mandiri
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan penanggulangan bencana dibagi jumlah masyarakat di kawasan rawan bencana dikali seratus persen	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana; Bidang Kedaruratan dan Logistik	Data masyarakat yang mendapat layanan penanggulangan bencana

			Penanggulangan Bencana; Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

20. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda yang Ditegakkan	Jumlah Perda yang mengandung sanksi yang ditegakkan dibagi dengan jumlah Perda yang mengandung sanksi dikali seratus persen	Satpol PP	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dikali 100%	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; Bidang Perlindungan Masyarakat	Data Pelanggaran K3
Terwujudnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat	Indeks Rasa Aman			
Meningkatnya Stabilitas Lingkungan	Rasio Linmas per RT	Jumlah Satuan Linmas dibagi jumlah RT	Bidang Perlindungan Masyarakat	Data Linmas

	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Kejadian Kebakaran	Jumlah tanggap kasus kebakaran dengan <i>response time rate</i> dibagi jumlah kasus total kebakaran dikali 100%	UPT Pemadam Kebakaran	Data Kejadian Kebakaran
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

21. INSPEKTORAT DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Penjaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Efektif dan Efisien	Level Maturitas SPIP	Hasil evaluasi SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dari BPKP
Terwujudnya Penjaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Efektif dan Efisien	Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP yang ditetapkan oleh BPKP	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dari BPKP
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Jumlah PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko dibagi jumlah PD dikali 100%	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV Sekretariat	Laporan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	Indeks Manajemen Risiko	Indeks Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV Sekretariat	Hasil Pengukuran Manajemen Resiko oleh BPKP
	Level Kapabilitas APIP	Nilai Level Kapabilitas APIP yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV Sekretariat	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>) dari BPKP
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi yang ditetapkan oleh Lembaga yang Berwenang	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV Sekretariat	Indeks yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPKA) yang Ditetapkan oleh Badan Pengawasan	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II	Laporan hasil pengukuran EPK oleh BPKP

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV Sekretariat	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

22. SEKRETARIAT DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kualitas Kelembagaan yang Efektif Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai SAKIP Kota Malang	Nilai SAKIP Kota Malang	Sekretariat Daerah	LHE KEMENPAN RB
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang Telah Ditetapkan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan dibagi jumlah produk hukum yang diusulkan oleh perangkat daerah x 100%	Bagian Hukum	Register Produk Hukum
Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Daerah	Nilai SKM	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Hasil Survei
Meningkatnya Kematangan Perangkat Daerah	Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah	Tingkat kematangan penataan perangkat daerah	Bagian Organisasi	Nilai kematangan Perangkat Daerah
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada SAKIP	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	Bagian Organisasi	LHE KEMENPAN RB

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Berdasarkan Analisis Beban Kerja	Tingkat Efisiensi Unit (EU) dan Tingkat Prestasi Kerja Unit (PU)	Efisiensi Unit = $\frac{\text{Beban Kerja Unit}}{\text{Jumlah Pegawai Unit} \times \text{Jam Kerja Efektif per Tahun}}$	Bagian Organisasi	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Nilai EKPPD	Nilai EKPPD	Bagian Pemerintahan	Nilai EKPPD
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indikator pemanfaatan sistem pengadaan 1. Sirup 2. <i>E-purchasing</i> 3. <i>Non e-tender/non e-purchasing</i> 4. <i>E-tendering</i> 5. Toko Daring 6. <i>E-kontrak</i>	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Penilaian LKPP
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

23. SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Pembentukan Perda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata SKM dari 7 jenis pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Hasil survei
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Propemperda yang menjadi Perda	Jumlah Propemperda yang menjadi Perda dibagi seluruh Propemperda dikali 100%	Sekretariat DPRD	Buku Dokumen Propemperda

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	LHE SAKIP Inspektorat Daerah
---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

24. KECAMATAN BLIMBING

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Blimbing	Hasil survei
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Kasi PM dan Kasi Trantib	Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata) kepuasan layanan atas masing-masing objek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan, jalan permukiman, drainase, sanitasi.	Kasi Prasarana dan Sarana	Hasil survei
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

25. KECAMATAN KEDUNGKANDANG

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kedungkandang	Hasil survei
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Kasi PM dan Kasi Trantib	Hasil survei

Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing objek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan, jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Kasi Sarpras	Hasil survei
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

26. KECAMATAN KLOJEN

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA UTAMA 2	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN 3	PENANGGUNG JAWAB 4	SUMBER DATA 5
Terwujudnya Kecamatan yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Klojen	Hasil survei
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi		Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing objek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan, jalan permukiman, drainase, sanitasi)		Hasil survei
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

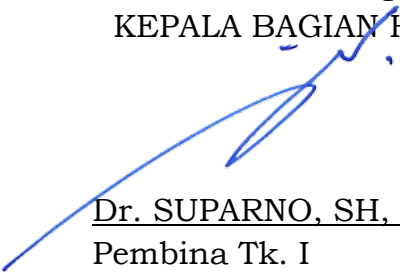
27. KECAMATAN LOWOKWARU

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Lowokwaru	Hasil survei
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lowokwaru	Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (IKLI)	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing objek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan, jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Seksi Sarana dan Prasarana Kecamatan Lowokwaru	Hasil survei
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

28. KECAMATAN SUKUN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Sukun	Hasil survei
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sukun	Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing objek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan, jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Sie Sarana Dan Prasarana Kecamatan Sukun	Hasil survei
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE SAKIP Inspektorat Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI